

RINGKASAN BERITA HARI INI

Pastikan Keterlibatan Legislatif dalam Pengendalian Pembangunan Daerah

KOTA-Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D). Bupati menyatakan bahwa raperda tersebut memiliki potensi untuk mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah.



SINERGI: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama anggota DPRD setelah rapat paripurna pembentukan raperda Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D) pekan lalu.

Dalam penjelasannya, Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu menjelaskan, mengacu pada Permenagri nomor 86 tahun 2017 yang menetapkan keterlibatan DPRD. Dalam penyusunan RKPd yang dimulai dari musrenbang keesamaan.

"Hal ini memastikan terciptanya mekanisme yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," katanya.

Dalam upaya menguatkan transparansi dan akuntabilitas,

menegaskan bahwa dalam proses penetapan dokumen perencanaan daerah dalam bentuk perda, DPRD akan selalu dilibatkan sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Dengan keterlibatan itu, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan DPRD.

Dia mengatakan, raperda SP4D diharapkan menjadi solusi dalam penguatan inovasi daerah pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Dengan adanya raperda tersebut, akan tercipta landasan hukum yang kokoh untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Gus Muhdlor juga berharap agar raperda SP4D segera disepakati oleh semua pihak terkait. Sehingga dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah di Sidoarjo. (nis/vga)

Komisi A DPRD Kab Sidoarjo Akan Ikut Perjuangkan Tenaga Honorer

koranrak | 08 August 2023, 00:09 am | 0 comments | 9 views



SIDOARJO, KORANRAKYATJATIM.COM - Dihapusnya tenaga honorer mendatang akan semakin was was para karyawan honorer yang ada di Pemkab Sidoarjo, menyusul adanya rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) akan menghapus status pegawai honorer di seluruh Indonesia mulai 28 November 2023 mendatang. Tentunya Komisi A DPRD Kab Sidoarjo Tidak Tinggal diam. BKD Sidoarjo dan Komisi A DPRD Sidoarjo berangkat ke Jakarta Kamis (3/8/2023) untuk memperjuangkan karyawan honorer yang ada Sidoarjo.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Ahmad Dhamroni Chudlori menyatakan akan mendampingi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo saat menghadiri pertemuan di kantor Kemen PAN-RB. Dia berangkat bersama Warih Andono, anggota Komisi A. Pertemuan itu direncanakan dihadiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari seluruh Indonesia. "Seluruh daerah mungkin punya masalah dan solusi yang berbeda untuk pegawai honorer ini," kata Dhamroni.

Yang bakal dibahas, antara lain, soal tenaga-tenaga honorer yang mungkin belum dapat skema lanjutan. Yakin, bagaimana pengabdian mereka selanjutnya di pemerintah daerah. Misalnya, ada daerah yang baru mengangkat banyak pegawai honorer. Masalahnya tentu lebih kompleks. Untungnya Sidoarjo tidak sampai seperti itu. Di Sidoarjo, yang belum masuk skema solusi adalah 2.533 pegawai honorer. Bisa jadi, di antara mereka, harus terkenca efisiensi dan rasionalisasi. Misalnya, jika sebuah pekerjaan cukup dilakukan 2 orang, tidak perlu ada 3 sampai 4 tenaga honorer. Persoalan lainnya menyangkut tenaga-tenaga teknis berkeahlian khusus. Misalnya, tenaga bidang teknologi informasi di Dinas Kominfo Sidoarjo. Mereka tidak mudah untuk di alihdayakan. Sebab, mereka punya keahlian khusus. Tidak mudah diganti begitu saja oleh orang lain. "Perlu dipikirkan cara yang lebih baik," tegas legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Dhamroni berharap pertemuan di Kemen PAN-RB akan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada tenaga honorer. Bagaimanapun, keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan oleh Pemkab Sidoarjo. Sebagian bahkan telah menggandi sangat lama. Belasan tahun.

Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo menyebutkan, saat ini, total ada 8.753 pegawai honorer di Pemkab Sidoarjo. Mereka bekerja di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Masa kerja bervariasi. Antara 2 tahun sampai 14 tahun. Di antara 8 ribuan pegawai honorer itu, 3.088 orang sudah tercatat dalam data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Nasibnya relatif lebih jelas. Mereka akan diprioritaskan untuk penataan. Baik mengikuti seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Bahkan, 1.179 sudah dipastikan lolos seleksi PPPK. Adapun sisanya, 5.665 orang belum masuk data base BKN. Namun, sudah ada 1.345 yang diterima menjadi PPPK. Jika ditotal, pegawai honorer yang telah lolos menjadi PPPK mencapai 2.524 orang. Yang belum lolos seleksi PPPK mencapai 6.229 orang.

Komisi B Ingatkan Desa Jangan Mark Up Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

DPRD Sidoarjo, Bhirawa

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bambang Pujianto, mengingatkan kepada para kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, agar dana bagi hasil pajak dan retribusi yang telah diterima dari Pemkab Sidoarjo, penggunaannya tidak sampai dimark up, bila dipakai untuk pembangunan desa.

Bambang mengatakan pada tahun 2023 ini, target dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp267 miliar. Laporan yang ia terima, per 31 Juli 2023, sudah masuk sebesar 58%.

"Semoga pada akhir Desember 2023, target PBB di Kabupaten Sidoarjo bisa tercapai," kata Bambang, Senin (7/8) kemarin, yang dihadirkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab Sidoarjo, saat kegiatan evaluasi realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Gedangan.

dirinya mengingatkan kepada 15 orang kepala desa disana, bahwa total masih ada Rp1,5 miliar piutang dari tanah kas desa (TKD) yang PBB nya harus dibayar di kecamatan itu. Dari 15 desa yang ada, paling banyak piutang TKD PBB nya, dari Desa Keboan Anom dan Kedua, Desa Kragan.

Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono SSos MSi, dalam kesempatan itu mengatakan di Kecamatan Gedangan, bagi hasil pajak dan retribusi untuk Kecamatan Gedangan, pada tahun 2023 ini total sebesar Rp5.967 miliar.

Desa penerima bagi hasil pajak dan retribusi paling banyak, ada di Desa Sawotrupa. Nilainya sebesar Rp400,78 juta. Ari berharap piutang PBB dari TKD yang ada di 15 desa disana, segera dilunasi.

Apalagi pada tahun 2023 ini, ada kebijakan supaya Pemdes bisa menyetor 10% APBDes nya, untuk

membayar piutang PBB dari TKD. Dari 15 desa di Kecamatan Gedangan, yang sudah melunasi piutang PBB TKD nya masih ada 2 desa saja. Yaitu Desa Seruni dan Desa Gedangan.

"Pertemuan ini untuk saling mengingatkan antara kita," kata Ari, yang juga didampingi Camat Gedangan, Ineke Dwi Setiawati SSTP. Dengan adanya sistem terbaru yang saat ini telah dibuat oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo, menurut Ari, para Kades saat ini bisa mengetahui sendiri, siapa-siapa warganya yang masih belum membayar PBB.

Data dari BPPD Kabupaten Sidoarjo, per 4 Agustus 2023, ada 5 kecamatan yang sudah masuk di ranking 5 besar dalam penerimaan PBB tahun 2023. Yaitu Kecamatan Waru (37,36%), Kecamatan Buduran (36,43%), Kecamatan Taman (34,92%), Kecamatan Gedangan (34,74%) dan Kecamatan Sedati (32,78%). [kus.dre]



Camat Gedangan, Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo dan Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, saat mengundangi 15 Kades di Kec Gedangan untuk evaluasi realisasi penerimaan PBB tahun 2023. alikusyanto/bhirawa



DIBIARKAN RUSAK: Kondisi depo pasar ikan di Lingkar Timur kemarin. Rencana revitalisasi terganjal anggaran.

Batal Revitalisasi Depo Pasar Ikan

SIDOARJO – Rencananya depo pasar ikan di Jalan Lingkar Timur direvitalisasi menjadi sentra kuliner dan ditata lebih modern. Namun, rencana itu terpaksa dibatalkan karena tak ada anggaran.

Kabid Bina Usaha Perikanan Dinas Perikanan Sidoarjo Septiawati Nugraheni menjelaskan, tahun ini tidak ada perbaikan sama sekali di depo pasar ikan. Baik revitalisasi besar maupun perbaikan kecil. "Perbaikan kecil juga tidak ada," katanya. Padahal, beberapa sudut

lokasinya tampak kumuh. Catnya mengelupas.

Pada 2021 dinas perikanan sempat akan merehabilitasi total depo pasar ikan. Rencananya, ada penambahan lantai bangunan untuk sentra kuliner sehingga ada spot baru di sana. Selama ini pengunjung hanya membeli ikan mentah.

Selain spot kuliner, ada rencana membuka spot pemancingan di area depo pasar ikan. Sebab, areanya luas dan potensial untuk wisata. Luasnya sekitar 2,6 hektare.

Plt Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo Bachruni Aryawan mengatakan, rencana tersebut batal karena tidak ada alokasi anggaran untuk revitalisasi depo pasar ikan. "Sehingga tidak jadi direvitalisasi tahun ini," ujar Bachruni kemarin (7/8).

Perkiraan, tahun depan revitalisasi juga tidak bisa dilaksanakan. Sebab, ada program pembangunan prioritas lain. Apalagi, menurut dia, kebutuhan anggaran untuk revitalisasi depo pasar ikan cukup tinggi. Butuh puluhan miliar rupiah. (uzi/c7/any)

KPU Sidoarjo: 91 Bacaleg dari 9 Parpol Tidak Memenuhi Syarat

Surat, 8 Agustus 2023 | 12:34 WIB | BNNK



Ketua KPU Sidoarjo, Mukhammad Iskak / Foto: sidoarjojnews.id

KOTA, SIDOARJONEWS.ID — Sebanyak 91 dari total 817 bakal calon legislatif (bacaleg) Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat alias TMS.

Hal itu berdasarkan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Sidoarjo Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo, Minggu (6/08/2023) kemarin.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pastikan Keterlibatan Legislatif dalam Pengendalian Pembangunan Daerah

KOTA-Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D). Bupati menyatakan bahwa raperda tersebut memiliki potensi untuk mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah.

Dalam penjelasannya, Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu menjelaskan, mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang menetapkan keterlibatan DPRD. Dalam penyusunan RKPD yang dimulai dari musrenbang kecamatan.

"Hal ini memastikan terciptanya mekanisme yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," katanya.

Dalam upaya menguatkan transparansi dan akuntabilitas,



SINERGI: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama anggota DPRD setelah rapat paripurna pembentukan raperda Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D) pekan lalu.

di dalam raperda juga akan ditambahkan ayat dalam Pasal 40 yang akan mengatur penyam-

paian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan. Lebih lanjut, Gus Muhdlor

menegaskan bahwa dalam proses penetapan dokumen perencanaan daerah dalam bentuk perda, DPRD akan selalu dilibatkan sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Dengan keterlibatan itu, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan DPRD.

Dia mengatakan, raperda SP4D diharapkan menjadi solusi dalam penguatan inovasi daerah pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Dengan adanya raperda tersebut, akan tercipta landasan hukum yang kokoh untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Gus Muhdlor juga berharap agar raperda SP4D segera disepakati oleh semua pihak terkait. Sehingga dapat segera diumumkan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah di Sidoarjo. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ahmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo bersama Kepala Dinas Koperasi saat menyerahkan penghargaan pada KS SMKN 2 Buduran.

Kopsis SMKN 2 Buduran Raih Penghargaan Paling Berprestasi 2023

Sidoarjo, Bhirawa

Setelah berhasil meraih prestasi secara rutin tiap tahun, mulai tahun 2012 hingga sekarang, baik di tingkat lokal, provinsi hingga tingkat nasional. Koperasi Siswa (Kopsis) SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo kini meraih prestasi sebagai Kopsis Kategori Paling Berprestasi 2023, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Prosesi penyerahan penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali, SIP bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Edi Kurniadi, ST MM kepada Kepala SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo Dra. Hj Mariya Ernawati, MM pada peringatan Hari Koperasi Nasional 2023 ke-76 yang sekaligus mengadakan Talk Show Sidoarjo Cooperative Business Forum (SCBF), Senin (7/8) kemarin di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo.

Usai menerima penghargaan Mariya Ernawati menuturkan kalau Kopsis SMK Negeri 2 Buduran merupakan salah satu ekstrakurikuler, yang bertujuan untuk memupuk jiwa kewirausahaan dan melatih kebersamaan/kekompakan sesama anggota, serta meningkatkan kemandirian.

Ia katakan, sejak berdirinya Kopsis kami selalu mengikuti berbagai event/ajang kompetisi untuk mengembangkan kreativitas dan daya saing siswa terus berinovasi. "Juga untuk meningkatkan softskill para anggotanya. Juga diadakan kegiatan 'Character Building' menguatkan kemampuan hardskill perkoperasian," katanya.

"Tentunya, penghargaan ini bisa menjadi motivasi untuk terus berkarya, dan mengembangkan sayap perkoperasian secara optimal. Sehingga terwujudnya kesejahteraan seluruh anggota," tandas Mariya. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor berharap kepada koperai untuk membuat kemitraan sebesar-besarnya. [ach.ina]

CS Dipantai dengan Caribonless

HARIAN
Bhirawa
Wala Dajud Wala Wadud

Komisi B Ingatkan Desa Jangan Mark Up Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

DPRD Sidoarjo, Bhirawa

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bambang Pujiyanto, mengingatkan kepada para kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, agar dana bagi hasil pajak dan retribusi yang telah diterima dari Pemkab Sidoarjo, penggunaannya tidak sampai dimark up, bila dipakai untuk pembangunan desa.

Bambang mengatakan pada tahun 2023 ini, target dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp267 miliar. Laporan yang ia terima, per 31 Juli 2023, sudah masuk sebesar 58%.

"Semoga pada akhir Desember 2023, target PBB di Kabupaten Sidoarjo bisa tercapai," kata Bambang, Senin (7/8) kemarin, yang dihadirkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab Sidoarjo, saat kegiatan evaluasi realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Gedangan.

Khusus di Kecamatan Gedangan,

dirinya mengingatkan kepada 15 orang kepala desa disana, bahwa total masih ada Rp1.5 miliar piutang dari tanah kas desa (TKD) yang PBB nya harus dibayar di kecamatan itu. Dari 15 desa yang ada, paling banyak piutang TKD PBB nya, dari Desa Keboan Anom dan Kedua, Desa Kragan.

Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono SSos MSi, dalam kesempatan itu mengatakan di Kecamatan Gedangan, bagi hasil pajak dan retribusi untuk Kecamatan Gedangan, pada tahun 2023 ini total sebesar Rp5.967 miliar.

Desa penerima bagi hasil pajak dan retribusi paling banyak, ada di Desa Sawotratap. Nilainya sebesar Rp400.78 juta. Ari berharap piutang PBB dari TKD yang ada di 15 desa disana, segera dilunasi.

Apalagi pada tahun 2023 ini, ada kebijakan supaya Pemdes bisa menyisihkan 10% APBDes nya, untuk

membayar piutang PBB dari TKD.

Dari 15 desa di Kecamatan Gedangan, yang sudah melunasi piutang PBB TKD nya masih ada 2 desa saja. Yakni Desa Seruni dan Desa Gedangan.

"Pertemuan ini untuk saling mengingatkan antara kita," kata Ari, yang juga didampingi Camat Gedangan, Ineke Dwi Setiawati SSTP. Dengan adanya sistem terbaru yang saat ini telah dibuat oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo, menurut Ari, para Kades saat ini bisa mengetahui sendiri, siapa-siapaarganya yang masih belum membayar PBB.

Data dari BPPD Kabupaten Sidoarjo, per 4 Agustus 2023, ada 5 kecamatan yang sudah masuk di ranking 5 besar dalam penerimaan PBB tahun 2023.

Yakni Kecamatan Waru (37.36%), Kecamatan Buduran (36.43%), Kecamatan Taman (34.92%), Kecamatan Gedangan (34.74%) dan Kecamatan Sedati (32.78%). [kus.dre]

Camat Gedangan,
Anggota Komisi B
DPRD Sidoarjo dan
Kepala BPPD
Kabupaten Sidoarjo,
saat mengundang
15 Kades di Kec
Gedangan untuk
evaluasi realisasi
penerimaan PBB
tahun 2023.

alikusyanto/bhirawa



CS Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
Bhirawa

Media Online Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

POLITIK

Supriyono SH.MH : Perusahaan Wajib Ijinkan Buruh Gunakan Hak Pilih

Admin — 07/08/2023

Share

🕒 Read Time: 57 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Pada sosialisasi pendidikan pemilih pemilu 2024 hari ketiga, Senin (7/8/2023), ada usulan menarik yang disampaikan Supriyono SH, MH, peserta sosialisasi yang juga Caleg Partai Gerindra dari Dapil Sidoarjo 3 (Wonoayu).



Usulan itu, terkait hadirnya payung hukum yang mengharuskan seluruh perusahaan, agar wajib memberikan kesempatan bagi pekerjaannya untuk memilih di hari H pemilu.

Payung hukum ini menurut Supriyono, bisa berupa Kepres maupun keputusan menteri tenaga kerja atau apapun, yang penting bisa menjadi penguat bagi para buruh, untuk aktif berpartisipasi sebagai pemilih.

"Kenapa payung hukum ini sangat urgent, agar tidak ada perusahaan yang semena-mena melarang buruhnya ikut pemilu karena alasan jam kerja," ujar Supriyono.

Masih menurut Supriyono, Point penting yang bisa dicantumkan pada payung hukum itu agar bisa dipatuhi perusahaan, harus diisi dengan hukuman pencabutan ijin pada perusahaan, yang menghambat buruh memberikan hak pilihnya.

Dengan payung hukum agak keras itu, dirinya yakin partisipasi pemilu khususnya dari teman-teman buruh bisa maksimal.

"Toh pemberian ijin hanya sehari itu saja ketika hari pelaksanaan pemilu. Saya yakin jika ada aturan yang tegas, maka indeks partisipasi pemilu akan bisa naik dari target yang digariskan penyelenggara pemilu" terangnya. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KPU Sidoarjo: 91 Bacaleg dari 9 Parpol Tidak Memenuhi Syarat



Ketua KPU Sidoarjo, Mukhammad Iskak / Foto: sidoarjonews.id



KOTA, SIDOARJONEWS.id — Sebanyak 91 dari total 817 bakal calon legislatif (bacaleg) Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat alias TMS.

Hal itu berdasarkan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Sidoarjo Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo, Minggu (6/08/2023) kemarin.

Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak menjelaskan, bahwa 91 bacaleg yang tidak memenuhi syarat itu terbagi di 9 partai politik (Parpol)

peserta Pemilu 2024.

"Hasilnya, sementara ada 91 bacaleg yang TMS dari 9 parpol peserta Pemilu," katanya saat dikonfirmasi, Senin (07/08/2023).

KPU Sidoarjo menjelaskan, puluhan bacaleg yang masuk dalam TMS ini berkaitan sejumlah persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Warta Jember - 100 Tahun Pergerakan Kemerdekaan Bangsa Indonesia 1908-2008, Sabtu, 10 Agustus 2023

"Rata-rata terkait syarat calon yang belum benar. Seperti legalisir ijazah dan lain-lain," ungkapnya.

Terkait bacaleg yang berlatar belakang kepala desa, Iskak menegaskan, sudah sesuai dan tidak ada masalah.

"Insyaallah sudah clear semua," ujarnya.

Untuk 91 bacaleg yang belum memenuhi syarat tersebut, partai politik pengusung masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

"Iya masih diberikan kesempatan perbaikan tahap kedua, sampai tanggal 11 Agustus besok," pungkasnya (Ipung)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rancang DCS, KPU Sebut Masih Ada 91 Bacaleg TMS

KOTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo telah mengumumkan hasil akhir dari proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif (bacaleg). Pengumuman tersebut dilakukan oleh Ketua KPU Sidoarjo M Iskak, Minggu (6/8).

Dari total 793 bacaleg yang telah diajukan, sebanyak 702 orang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Sementara sebanyak 91 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Jumlah tersebut berasal dari 9 partai politik (parpol).

Meski begitu, Iskak me-

nyebut masih ada kesempatan bagi bacaleg yang belum memenuhi syarat untuk melakukan perbaikan tahap 2. Perbaikan tersebut dapat dilakukan mulai 6 hingga 11 Agustus mendatang. "Bersamaan dengan tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)," ujarnya.

Setelah itu, pada 11 hingga 17 Agustus akan dilakukan tahapan penyusunan DCS. Dilanjutkan pada 18 Agustus DCS akan ditetapkan. Sedangkan 19 Agustus hasil DCS akan diumumkan kepada publik. (nis/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Satlantas Polresta Sidoarjo

Hapus Zig Zag dan Angka 8 Uji Praktek SIM C Permudah Pemohon

SIDOARJO - Penerapan lintasan uji kompetensi SIM C, diseluruh jajaran Kepolisian khususnya Satpas SIM kini lebih muda. Polda Jatim menghapus tes angka 8 dalam ujian praktik SIM C di semua Satpas Satlantas Polres dan Polresta di jajaran Polda Jatim khususnya.

Keputusan tersebut dilaksanakan sejak hari Kamis (8/8/23). Hal ini sesuai imbauan Kapolri Jenderal Listyo Sigit melalui Kakorlantas Polri. Dalam keputusan tersebut dibuat kemarin, seluruh jajaran Satpas Satlantas mulai mengganti/ merubah pola sirkuit dari angka 8 menjadi S, agar dapat diterapkan dan mempermudah para peserta ujian SIM telah mulai

Ipda Meddif selaku BAUR pelayanan SIM Satlantas Polresta Sidoarjo khususnya (Roda dua) dalam hal ini SIM C mengatakan bahwa di tempat Uji coba tes pada Senin (7/8/2023) kepada wartawan, "Hal ini sesuai dengan perintah Kapolri dan petunjuk Kakorlantas untuk memudahkan masyarakat dalam

pengurusan SIM," terangnya.

Hal ini telah melaksanakan kajian juga dari beberapa negara. Akhirnya di buat satu lintasan yang menggabungkan materi ujian praktek. Salah satunya yuton, garis lurus, serta zig zag dan angka 8 yang dirubah menjadi huruf S. Kemudian reaksi huruf Y itu dirubah menjadi satu kesatuan dengan tujuan sebagai simulasi masyarakat dalam berkendara di jalan dan untuk memudahkan masyarakat tentunya.

"Untuk Perkap kita mengajinya ketentuan Kakorlantas di keluaran Sabtu kemarin dan hari Senin ini harus di laksanakan semua, itu perintah," terangnya.

Berdasarkan fakta sudah 80% (hampir semua) lebih sudah lulus tes, dan untuk kesulitan sudah di kurangi jadi benar-benar menyeleksi masyarakat yang tidak bisa naik sepeda motor, "sambungunya.

Peresmian penghapusan uji SIM C ini, disambut oleh peserta Ujian kelayakan motor (R2).



Lintasan uji kompetensi SIM C Satpas Satlantas Polresta Sidoarjo Senin(8/8/23).

Dari salah satu pemohon uji kompetensi SIM membeberkan penjelasannya, "Semua pengurus/

pemohon SIM semua mengatakan positif, 80 persen lulus. Karena lebih gampang dan muda dibanding

dengan kemarin angka delapan lebih rumit," ungkap rata-rata pemohon SIM pada wartawan. • Loe

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Satlantas Terapkan Lintasan Baru Uji Praktik SIM C tanpa Angka 8

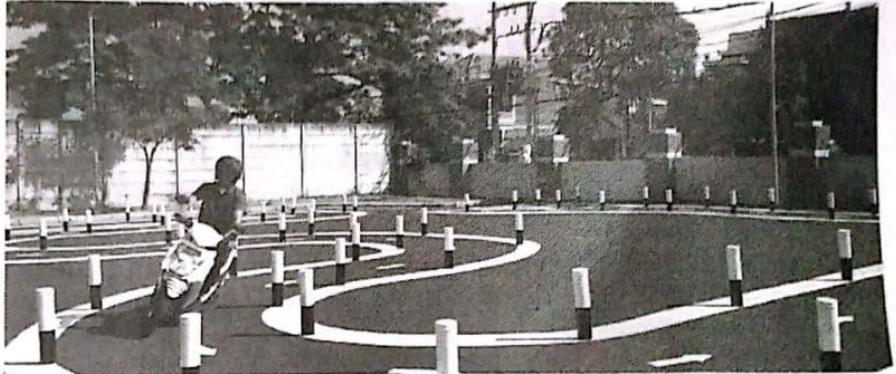
Sidoarjo, Memorandum

Satlantas Polresta Sidoarjo pada 7 Agustus 2023 mulai menerapkan bentuk baru lintasan uji praktik surat izin mengemudi (SIM) C sehingga tidak ada lagi lintasan angka 8 dan zig-zag.

Perubahan bentuk lintasan uji praktik SIM C ini merupakan keputusan dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk kemudian diterapkan di seluruh Indonesia. Perubahan yang terjadi diklaim tetap mengutamakan keselamatan dan keahlian berkendara motor.

Pada materi baru, ujian praktik SIM C akan dilakukan pada lintasan berbentuk sirkuit yang spesifikasinya telah diperbarui dari versi lama.

Sementara itu, Paur SIM Satlantas Polresta Sidoarjo Ipda Meddif Wisudawan Bima Sakti Kusnan, S.Tr.K menjelaskan sirkuit uji praktik SIM C terbaru memiliki tiga lintasan lurus dan lima area berbelok yang



Pemohon SIM C melaju di lintasan baru uji praktik SIM C tanpa angka 8 dan tetap mengutamakan keselamatan dan keahlian berkendara motor.

satu bagiannya menyerupai huruf S.

“Saat uji praktik dimulai, pemohon SIM C ini akan masuk melalui garis *start*, lalu keluar dari sisi lainnya setelah menyelesaikan semua tantangan pada sirkuit itu,” ujarnya.

Meddif melanjutkan bahwa lintasan ini mengakomodir empat materi ujian praktik dengan ukuran yang

sudah diperlebar dan tanpa materi zig-zag atau slalom tes. Kemudian uji membentuk angka delapan digantikan dengan uji membentuk huruf S.

Perubahan lainnya adalah pada ukuran lintasan yang diperlebar. Tadinya 1,5 kali lebar kendaraan kini menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. (jok/nov)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



Lintasan baru dalam uji praktik SIM C di Satlantas Sidoarjo kini tanpa angka 8.

Praktik SIM C di Sidoarjo tanpa Angka 8

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Satlantas Polresta Sidoarjo pada Senin (7/8) mulai menerapkan bentuk baru lintasan uji praktik Surat Izin Mengemudi (SIM) C, sehingga tidak ada lagi lintasan angka 8 dan zig zag.

Perubahan bentuk lintasan uji praktik SIM C ini merupakan keputusan dari Korps Lalu Lintas Polri untuk kemudian diterapkan di seluruh Indonesia. Perubahan yang terjadi diklaim tetap mengutamakan keselamatan dan keahlian berkendara sepeda motor.

Pada materi baru, ujian praktik SIM C akan dilakukan pada lintasan berbentuk sirkuit yang spesifikasinya telah diperbarui dari versi lama.

Paur SIM Satlantas Polresta Sidoarjo Ipda Meddif Wisudawan Bima Sakti Kusnan, menjelaskan, sirkuit uji praktik SIM C terbaru memiliki tiga lintasan lurus dan lima area berbelok, yang satu bagiannya menyerupai huruf S.

“Saat uji praktik dimulai, pemohon SIM C ini akan masuk melalui garis start, lalu keluar dari sisi lainnya setelah menyelesaikan semua tantangan pada sirkuit itu,” ujarnya.

Ipda Meddif melanjutkan bahwa lintasan ini mengakomodir empat materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi zigzag atau slalom tes. Kemudian, uji membentuk angka delapan digantikan dengan uji membentuk huruf S.

Perubahan lainnya adalah pada ukuran lintasan yang diperlebar. Tadinya 1,5 kali lebar kendaraan kini menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. (cat/rd)

Maintenance Lampu PJU Habis Sejak Bulan Mei 2023

SIDOARJO - Permasalahan yang hampir setiap hari ada terkait penerangan jalan umum (PJU) kerap kali masih ditemui laporan di Call Center 112. Pasalnya terkait padamnya atau rusaknya lampu PJU di jalan Kabupaten khususnya di Sidoarjo. Namun kali ini permasalahan ada di material (sparepart).

Pantauan duta dilapangan ditemui kendala permasalahan maintenance PJU yang dibawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo sejak bulan Mei 2013 terkendala kurangnya sparepart PJU (lampu).

Kepala bidang PJU Dishub Sidoarjo, Ari Prabowo saat dikonfirmasi Senin, (7/8/23) menyampaikan kendala sekarang yang terjadi sejak bulan Mei 2023 untuk material lampu sudah habis.

Masih lanjut Ari, untuk sementara kami hanya bisa mendata dan menginventarisasi lampu yang harus di ganti (bila

mati). Jadi selama kami bisa memperbaiki maka akan kami perbaiki akan tetapi kalau memang harus ganti lampu ya kami nunggu P.A.K untuk pengadaan material lampunya.

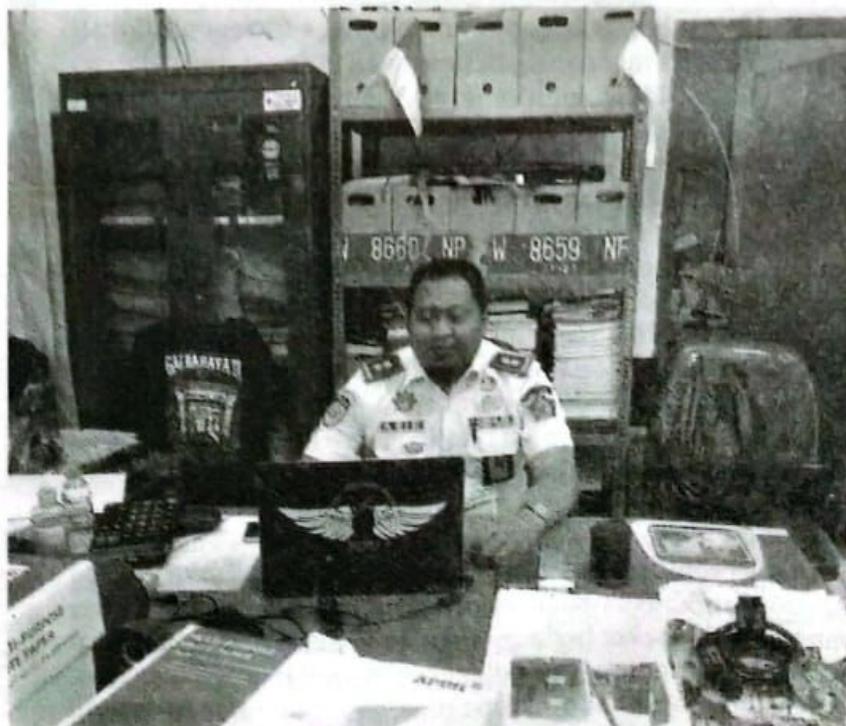
"Tahun 2023 kami hanya di beri anggaran sebanyak 800 buah lampu dan itu sudah habis sejak bulan Mei kemarin. Karena rata-rata kami tiap bulannya membutuhkan 100-150 lampu," ungkapnya.

Perlu diketahui untuk jenis yang kami pakai sekarang adalah jenis LED, karena dapat menghemat listrik.

"Dan baru diganti di tahun 2022 sekitar 3.600 an jadi masih kurang 30.000 an.

2023 hanya bisa mengganti 800 an titik. Dan jika P.A.K 2023 di sahkan hanya dapat lampu 350 buah," terangnya.

Harapannya agar tahun 2024 jangan sampai kekurangan lampu karena jumlah lampu yang tercatat sebanyak 34.713 titik. ● Loe



Kepala bidang PJU Dishub Sidoarjo, Ari Prabowo, ditemui duta.co, Senin, (7/8/23) di kantornya.

DELTA PUNYA



AHMAD REZA/JAWA POS

BAHAS PROYEK RAJA AIRLANGGA: Prasasti Kamalagyan di permukiman Dusun Klagen, Tropodo, Krian, kemarin.

Prasasti Kamalagyan yang Bercerita soal Bendungan

SIDOARJO - Jika dilihat dari jauh, batu besar di tengah permukiman Dusun Klagen, Tropodo, Krian, itu tampak seperti tugu biasa. Namun, jika dicermati, ada pahatan huruf Sanskerta yang menceritakan kisah masa lalu. Sebab, batu tersebut adalah sebuah prasasti bernama Kamalagyan.

Menurut Usin, penjaga sekaligus perawat situs Kamalagyan, prasasti bertinggi lebih dari 2 meter itu diduga sudah ada sejak 950 Saka atau 1037 Masehi. "Isinya tentang berita mengenai Raja Airlangga," ungkapnya.

Di batu itu tertulis kisah tentang Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan yang membuat Bendungan Waringin Sapta. "Isinya berita pembuatan bangunan semacam bendungan atau dam untuk memecah aliran Sungai Brantas," ujarnya.

Menurut prasasti tersebut, aliran Sungai Brantas yang sekarang hingga Kali Porong ini merupakan bentukan dari Raja Airlangga. "Dulu pecahan sungainya kadang masuk permukiman dan bikin banjir. Lalu dibendung, kemudian menjadi beberapa sungai yang hulunya ada di Kediri," tutur pria 61 tahun itu.

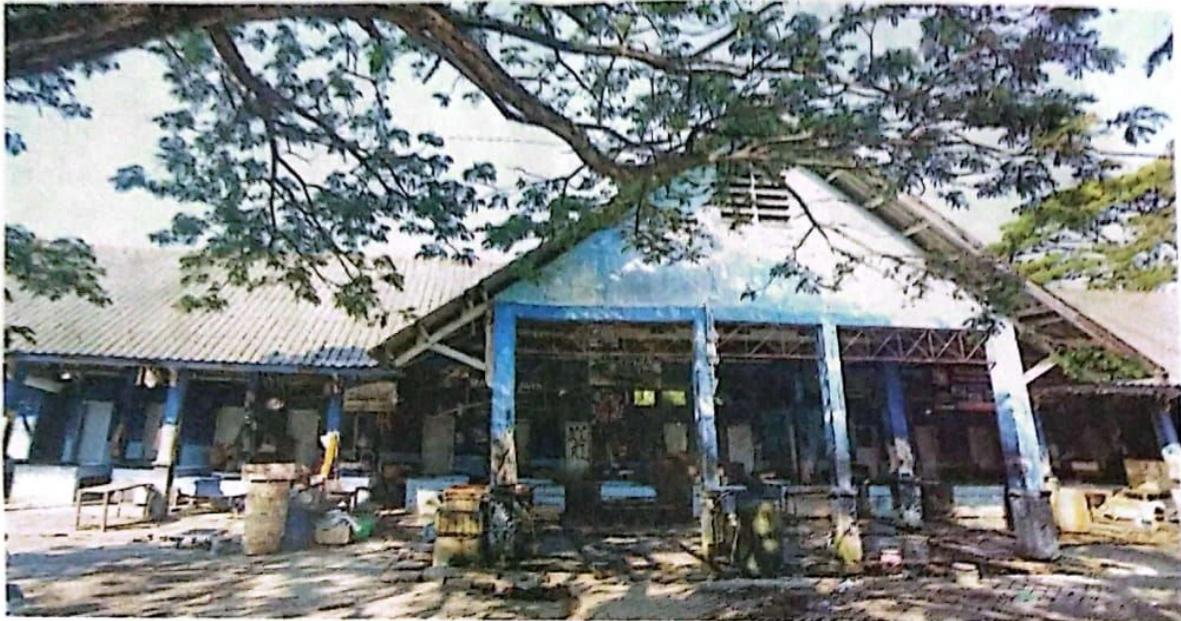
Prasasti Kamalagyan sempat hendak dibawa ke Surabaya untuk dimuseumkan. Tetapi, saat digali ada fondasi bata kuno di bawah prasasti tersebut. "Bata itu seperti menyatu ke bagian bawah prasasti sehingga sulit membongkarnya," jelas generasi ketiga penjaga Prasasti Kamalagyan tersebut.

Akhirnya, batu tersebut dibiarkan di lokasi aslinya. "Konon kata ayah saya dulu kalau musim kemarau terus prasasti ini *dimandiin*, disiram air sini bakal hujan. Tapi, kebenarannya bagaimana saya belum pernah membuktikan sendiri," katanya. (eza/c19/any)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



**DIBIARKAN
RUSAK:**
Kondisi
depo pasar
ikan
di Lingkar
Timur
kemarin.
Rencana
revitalisasi
terganjal
anggaran.

DIMAS MALILANA/JAWA POS

Batal Revitalisasi Depo Pasar Ikan

SIDOARJO – Rencananya depo pasar ikan di Jalan Lingkar Timur direvitalisasi menjadi sentra kuliner dan ditata lebih modern. Namun, rencana itu terpaksa dibatalkan karena tak ada anggaran.

Kabid Bina Usaha Perikanan Dinas Perikanan Sidoarjo Septiwati Nugraheni menjelaskan, tahun ini tidak ada perbaikan sama sekali di depo pasar ikan. Baik revitalisasi besar maupun perbaikan kecil. "Perbaikan kecil juga tidak ada," katanya. Padahal, beberapa sudut

lokasinya tampak kumuh. Catnya mengelupas.

Pada 2021 dinas perikanan sempat akan merehabilitasi total depo pasar ikan. Rencananya, ada penambahan lantai bangunan untuk sentra kuliner sehingga ada spot baru di sana. Selama ini pengunjung hanya membeli ikan mentah.

Selain spot kuliner, ada rencana membuka spot pemancingan di area depo pasar ikan. Sebab, areanya luas dan potensial untuk wisata. Luasnya sekitar 2,6 hektare.

Plt Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo Bachruni Aryawan mengatakan, rencana tersebut batal karena tidak ada alokasi anggaran untuk revitalisasi depo pasar ikan. "Sehingga tidak jadi direvitalisasi tahun ini," ujar Bachruni kemarin (7/8).

Perkiraanannya, tahun depan revitalisasi juga tidak bisa dilaksanakan. Sebab, ada program pembangunan prioritas lain. Apalagi, menurut dia, kebutuhan anggaran untuk revitalisasi depo pasar ikan cukup tinggi. Butuh puluhan miliar rupiah. (uzi/c7/any)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos